

Motivasi Indonesia menandatangani *Preferential Trade Agreement* (PTA) dengan
Mesir Tahun 2011

Oleh: Indra Pratama

0901135104

(indrapratama1128@yahoo.co.id)

Pembimbing: Pazli, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293– Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study analyzes the factors that motivate Indonesia signed a preferential trade agreement with Mesir in 2011 . the reasons which prompted Indonesia to cooperate with Mesir to better cooperation , free trade agreements . This study will also explain the Indonesian trip begins negotiations of the Comprehensive Trade on Economic Partnership (CTEP) by Indonesia and Mesir signed in 2005 , both from the development and scope of negotiations .

Keywords: Preferential Trade Agreement, Cooperation, Factors.

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.¹

Liberalisasi perdagangan dan investasi yang dibarengi dengan

pesatnya kemajuan teknologi komunikasi antar bangsa menuntut antisipasi yang cepat oleh setiap negara agar mampu bersaing dengan negara lain dalam bidang tersebut, baik dalam forum regional maupun internasional, seperti APEC, AFTA, dan WTO. Sementara itu, perwujudan era perdagangan bebas global (*global free trade*), pada satu sisi, telah menjadi obsesi bagi sebagian negara, terutama negara negara industri/maju. Sebaliknya, bagi sebagian negara lainnya, terutama negara negara yang keadaan ekonominya lemah, perdagangan bebas menjadi ancaman yang serius yang dapat semakin

¹ Muhammad Sood, "*Hukum Perdagangan Internasional*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

melemahkan keadaan dan kemampuan ekonominya. Namun demikian, mau tidak mau, cepat atau lambat, kelompok negara yang terakhir ini harus ikut dalam proses perdagangan bebas tersebut.²

Indonesia menjadi anggota WTO sejak tanggal 1 Januari 1995. Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang membawa konsekuensi baik eksternal maupun internal. Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. Hal ini sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan iktikad baik). Konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO. Artinya dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu rambu ketentuan WTO.³ Indonesia merupakan salah

satu negara berkembang anggota WTO dan penerapan prinsip preferensi bagi negara berkembang juga diperoleh oleh Indonesia. Salah satu manfaat dari penerapan prinsip ini yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia adalah dengan diterapkannya GSP (*the Generalized System of Preferences/Sistem Preferensi Umum*) dalam keberhasilan Indonesia untuk meningkatkan ekspornya, terutama dalam ekspor nonmigas. Pemberian GSP terhadap Indonesia ini diberikan hanya untuk produk nonmigas saja dan tidak berlaku untuk produk migas.⁴

Pemberian GSP ini dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke luar negeri. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu negara berkembang memperluas ekonomi mereka dengan mengizinkan barang-barang tertentu yang akan diimpor ke negara maju mendapatkan fasilitas bebas bea masuk. Pemberian GSP ini tidak diberikan tanpa syarat, ada ketentuan yang harus dilaksanakan oleh negara berkembang untuk memperoleh GSP tersebut. Aturan main pemberian GSP oleh negara maju, antara satu negara dengan negara lainnya sangat berbeda. Namun, secara prinsip pemberian fasilitas ini senantiasa didasarkan kepada pasal-pasal mengenai pemberian preferensi yang terdapat di dalam perjanjian perdagangan internasional GATT dan WTO.

² Visi Indonesia 2020.
<http://www.bappenas.go.id/files/3413/5228/296/0/visi2002__20090929140041__2080__11.pdf>,
diakses tanggal 31 Maret 2014

³ Muhammad Sood, *op. cit.*, hal. 13.

⁴ Muhammad Sood, *op. cit.*, hal. 272.

Indonesia mengalami kendala dalam pelaksanaan prinsip preferensi sebagai negara berkembang, kendala yang dihadapi Indonesia merupakan kendala dalam pelaksanaan GSP tersebut. Pemanfaatan fasilitas GSP yang diberikan oleh negara maju tidak termanfaatkan secara maksimal oleh eksportir Indonesia. Pertama, hal ini dapat terjadi karena tidak semua produk yang diberikan GSP adalah produk ekspor non migas Indonesia. Kedua, karena ketidaktahuan para eksportir Indonesia tentang fasilitas GSP karena kurangnya informasi dari pemerintah atau memang keengganan dari eksportir Indonesia untuk masuk pasar negara maju pemberi GSP karena kekhawatiran kalah bersaing walau ada fasilitas GSP atau eksportir kita yang hanya berani untuk memasarkan produknya di dalam negeri saja.⁵ Selain itu adanya batas waktu (jangka waktu) pemberian GSP. Apabila jangka waktu GSP ini telah berakhir, maka untuk melakukan perpanjangan dalam perjanjian GSP ini dibutuhkan waktu yang lama dalam melakukan perundingan dengan negara pemberi GSP. Pemberian GSP ini bukan semata-mata ditujukan untuk pengembangan ekonomi semata. Akan tetapi, lebih bernuansa politik sebagai salah satu cara guna menekan negara-negara berkembang agar mengikuti

kebijakan dari negara-negara maju. Dengan demikian, GSP tersebut dapat dicabut apabila negara-negara penerima GSP tidak melaksanakan kepentingan negara maju (pemberi GSP), terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tidak mendukung demokrasi sosial, mengabaikan lingkungan hidup (tidak pro-lingkungan hidup), dan sebagainya.⁶

Dalam perkembangannya, tata cara pemberian GSP oleh negara maju kepada negara penerima GSP selalu berubah-ubah menurut kebutuhan, sering kali didapati bahwa perubahan-perubahan tersebut cenderung makin memperkecil ruang lingkup preferensi yang sudah dinikmati oleh pengusaha pengguna GSP atau malah dihapuskan preferensi tersebut. Karena GSP pada hakikatnya adalah pemberian preferensi dari satu negara ke negara lain maka sebagian besar dari perubahan tata cara maupun skema GSP yang diberikan tidak dilakukan perundingan untuk adanya suatu perubahan. Sistem preferensi umum yang diberikan negara maju secara unilateral dapat ditarik sewaktu-waktu sehingga posisi negara berkembang sangat lemah.⁷

Melihat hal ini, Indonesia bergerak cepat untuk melakukan sistem prefensial perdagangan namun dengan negara yang setara dengannya (negara berkembang) yaitu Mesir,

⁵ GSP UE dan Manfaatnya Bagi Indonesia.
<http://www.indonesianmission.eu.org/website/page309696063200309054484127.asp>, diakses tanggal 31 Maret 2013.

⁶ Muhammad Sood, *op., cit.*, hal. 43

⁷ *Ibid*, hal. 272

yang mana pada 2005 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir telah menandatangani *Comprehensive Trade on Economic Partnership* (CTEP). kedua negara setuju untuk memulai negosiasi *Preferential Trade Agreement* (PTA) sebagai langkah awal dalam mencapai kesepakatan *Free Trade Agreement* (FTA) yang menjadi tujuan akhirnya dan untuk mengimplementasikan CTEP, kedua Menteri Perdagangan setuju untuk mendirikan *Join Study Group* (JSG) guna mengkaji kelayakan FTA antara kedua negara. Pertemuan Bilateral Mendag RI dgn Mendagi Mesir, tanggal 12-14 Januari 2010.⁸

Pembahasan

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947, pada Artikel 24 Paragraph 4 menyebutkan: “*The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements. They also recognize that the purpose of a customs union or of a free trade area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to*

the trade of other contracting parties with such territories”.

Berdasarkan artikel di atas, anggota *World Trade Organization* (WTO) diberikan keleluasaan untuk membentuk suatu perjanjian daerah perdagangan bebas dengan negara lain. Namun demikian kebebasan kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip *Most Favoured Nation*. Artinya negara yang menjadi pihak pada *Free Trade Area* boleh saling memberikan perlakuan istimewa, namun tidak dapat meningkatkan hambatan kepada negara anggota WTO lainnya melebihi komitmen yang telah disampaikannya kepada WTO.

Demikian juga halnya dengan Indonesia, untuk meningkatkan perdagangan dengan Mesir, saat ini sedang dilakukan upaya untuk dapat menyelesaikan perundingan *Preferential Trade Agreement* (PTA). Perundingan PTA yang diusung dengan wadah *Join Study Group* (JSG) yang telah melalui beberapa perundingan.

Beberapa Pertimbangan Indonesia terkait dengan Joint Study Group PTA dengan Mesir:

- a. Aspek Geografis Mesir perlu dipertimbangkan sebagai salah satu pasar utama bagi produk Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan : Posisi geo-strategis Mesir dengan keberadaan terusan

⁸Indonesia- mesir JSG.pdf
<http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Bilateral/Kerjasama/Subdit%20Afrika%20&%20Timur%20Tengah/Indonesia-Mesir%20JSG.pdf>, diakses tanggal 10 september 2013.

Suez yang menjembatani Asia, Afrika, dan Eropa; Mesir dapat diarahkan sebagai pintu gerbang perdagangan dan daerah tujuan investasi Indonesia di kawasan sekitar mengingat adanya berbagai kesepakatan perdagangan bebas Mesir secara bilateral dan regional, antara lain melalui COMESA (dengan negara-negara Afrika timur dan selatan), *Agadir Agreement* (negara-negara Arab di kawasan laut tengah), Arab FTA, FTA dengan Turki, dan FTA dengan EFTA (Iceland, lichtenstein, Norway, dan Swiss), maupun Egypt – EU Partnership serta Qualifying Industrial Zone Scheme dengan AS;

- b.** Aspek politik. Hubungan bilateral dalam bidang politik antara RI-Mesir sampai saat ini berlangsung baik. Secara historis, Mesir adalah salah satu negara terkemuka dan pertama yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 10 Juni 1947 secara resmi dibuka hubungan diplomatik antara kedua negara. Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Mesir itu dilakukan melalui penandatanganan *The Treaty of Friendship and*

Cordiality yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan perwakilan RI di Kairo pada tahun 1949 merangkap Somalia (sejak 1965) dan Djibouti (sejak 1979).

- c.** Dasar Hubungan Bilateral. *Trade Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Arab Republic of Egypt.; MoU The Information on and Decision Support Centre (IDSC) Egypt and The Industrial Information Centre (Pusdata); MoU Indonesia – Mesir (National Agency for Export Development Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Egyptian Commercial Representation (ECR) Ministry of Foreign Trade and Industry of the Arab Republic of Egypt) on Trade Promotion Cooperation; Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Arab Republic of Egypt on Economic and Technical Cooperation.*
- d.** Analisa *Country Profile* Mesir; Indikator hubungan perdagangan bilateral Indonesia dengan Mesir menunjukkan intensitas yang cukup besar di antara kedua negara. *Trade complementarity index* menunjukkan kecocokkan

struktur ekspor Indonesia dengan impor Mesir sebesar 42,87% artinya sekitar 42% dari jumlah jenis komoditi yang diimpor oleh Mesir merupakan komoditi yang diekspor Indonesia.⁹

Perundingan PTA antara Indonesia dan Mesir dimaksudkan agar:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kerja sama perekonomian antara kedua negara.
2. Memfasilitasi aktivitas pelaku usaha Indonesia-Mesir.
3. Memperluas hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua negara.
4. Memperluas pasar.
5. Mengurangi hambatan perdagangan kedua negara dengan tujuan akhir untuk menciptakan *Free Trade Area* (FTA).

Di dalam Artikel 2 (dua) dari *Draft Preferential Trade Agreement* yang telah disepakati oleh kedua negara disebutkan bahwa cakupan produk dalam PTA antara Indonesia-Mesir adalah seperti yang tertuang di dalam Lampiran I dan Lampiran II dalam perjanjian tersebut. Lampiran I adalah daftar produk yang diminta oleh Indonesia kepada Mesir untuk diturunkan tarifnya dan Lampiran II adalah daftar produk yang diminta

Mesir kepada Indonesia untuk diturunkan tarifnya.

Perundingan *Join Study Group* antara Indonesia-Mesir membutuhkan 5 tahun dan 6 babak pertemuan untuk negosiasi. Dengan mengidentifikasi hambatan dan potensi perdagangan dan investasi kedua negara melalui dialog G to G & B to B; melakukan misi dagang dua arah; serta melakukan *Joint Study Group*.

Namun awal tahun 2011 merupakan momentum bersejarah dalam perkembangan politik di Timur Tengah, termasuk di Mesir. Revolusi yang digerakkan oleh rakyat Mesir berawal pada 25 Januari 2011, menuntut pengunduran diri Presiden Mubarak. Unjuk rasa yang berlangsung selama kurang lebih 18 hari, berakhir dengan pengunduran diri Mubarak pada 11 Februari 2011, dan Pemerintahan Transisi Mesir diambil alih oleh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir (*Supreme Council of the Armed Forces/SCAF*), dengan Ketua Dewan Tertinggi, Marsekal Hussein Tantawi, sebagai Pimpinan. Dalam kaitannya dengan perkembangan politik tersebut, dalam hal ini Mesir menilai bahwa proses reformasi dan demokratisasi Indonesia yang berawal pada tahun 1998 merupakan contoh nyata yang dapat menjadi rujukan Mesir dalam menjalani masa demokratisasi saat ini.

Di tahun yang sama dengan kejadian Revolusi Mesir pada tanggal 24 juni 2011 Pemerintah Republik

⁹ *Ibid*

Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir meratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2011. Kedua belah pihak meyakini bahwa kesepakatan kerjasama ekonomi tersebut merupakan jalur penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang seimbang dan saling menguntungkan.

Perundingan *Join Study Group* antara Indonesia-Mesir telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan pertemuan terakhir dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 24 juni 2011. Perkembangan dari perundingan tersebut, sebagai berikut:

Pada pertemuan JSG pertama di kairo Mesir merupakan pertemuan G to G. Pada pertemuan ini dibahas *sector/area* yang diusulkan oleh masing-masing pihak. Hasil pertemuan ini dirangkum dalam *record of meeting*.

Pada pertemuan kedua, di Jakarta merupakan pertemuan antara *Govermen dan Govermen* diadakan pula acara *Business Forum* yang diikuti oleh 20 orang pengusaha Mesir dan 25 pengusaha papan atas Indonesia. Dalam kesempatan ini pelaku bisnis dari kedua negara saling berbagipengalaman mengenai kegiatan usaha di masing-masing negara. *Business Forum* ini juga diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk peningkatan investasi dan perdagangan Indonesia-Mesir. Selanjutnya pada 14 Januari 2010 delegasi Mesir

mengunjungi perusahaan garmen di Cileungsi - Bogor dan ke Daihatsu Otomotif di Sunter, Jakarta.

Pada Pertemuan ketiga, pada tanggal 24 juni 2011, Pertemuan ini ditujukan untuk me- *review* hasil pertemuan pertama dan kedua, dengan mengesahkan ke perjanjian kerjasama perdagangan dan investasi dengan mesir tahun 2011. Namun pada pertemuan JSG kedua ini, Indonesia dan Mesir belum dapat menemukan titik temu untuk memenuhi request list masing-masing sehingga mengakibatkan perundingan belum dapat menghasilkan sebuah keputusan.

Pada Pertemuan keempat menyimpulkan dan membuat rekomendasi akan langkah-langkah yang akan dilakukan masing-masing dalam bentuk *Report of the meeting (report of the study)*. Laporan akan mencakup rekomendasi yang berisi, antara lain kapan kelayakan PTA, cakupan, *time schedule*, dan *level of negotiators*. Laporan tersebut akan ditandatangani oleh pemerintah kedua pihak (*G to G*). Pertemuan JSG keempat, yang disepakati dilaksanakan di Kairo, Mesir pada waktu yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Faktor-faktor yang memotivasi Indonesia menandatangani Preferential Trade Agreement dengan Mesir.

Secara umum, ada beberapa faktor yang mendorong sebuah negara

melakukan perdagangan dengan negara lain, diantaranya:

1. Memenuhi barang dan jasa di dalam negeri.
2. Memperluas jangkauan pasar.
3. Tidak meratanya sumber daya alam.
4. Perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Adanya kesamaan selera dan mengonsumsi barang.
6. Dorongan untuk menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain.
7. Terjadinya era globalisasi yang memungkinkan negara tidak dapat hidup sendiri.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis produk ekspor unggulan apabila diolah dengan baik. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang tinggi berarti tingginya *supply* tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong sektor industri padat karya yang dapat mendorong pengembangan ekspor di sektor ini.

Selama ini, produk-produk Indonesia mendapat sambutan positif dari para importir Mesir karena dinilai memiliki keunggulan dalam hal kualitas dan detail pengerjaan. Beberapa produk unggulan Indonesia di Mesir antara lain: produk pertanian dan olahan (kelapa, teh, kopi, tembakau, kayu manis, gula, CPO, gandum), produk buah-buahan dan buah-buahan olahan (nanas, jeruk),

kertas dan alat tulis, plastik dan bahan baku plastik, yarn, katun dan pakaian jadi, ban, alat rumah tangga, furniture dari kayu dan rotan.

Indonesia selalu mencatat surplus perdagangan dengan Mesir dalam beberapa tahun terakhir. Sekalipun keadaan perekonomian Mesir belum pulih sepenuhnya dari krisis ekonomi global tahun 2008, ekspor Indonesia ke Mesir hingga 2010 terus berlangsung dengan surplus yang cukup signifikan bagi Indonesia dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, total perdagangan non-migas Indonesia dengan Mesir pada tahun 2010 tercatat USD 1,07 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 33,3% dibanding dengan periode tahun 2009, yang nilainya mencapai USD 802,56 juta. Meski terjadi revolusi di Mesir, volume perdagangan Indonesia-Mesir pada periode Januari-Juni 2011 tetap mengalami kenaikan sebanyak 49,51% dan mencapai USD 725,59 juta berbanding periode Januari-Juni 2010 yang mencapai USD 489,30 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa Mesir merupakan pasar potensial dalam mengembangkan perdagangan non-migas Indonesia.¹⁰

Di bidang Investasi Indonesia mendominasi dalam hubungan

¹⁰ Profil dan kerjasama Mesir, dari <<http://www.kemlu.go.id/cairo/Pages/AboutUs.aspx?IDP=4>> di akses pada tanggal 7 maret 2014

bilateral Indonesia-Mesir yaitu dengan menciptakan nilai investasi yang cukup besar di Mesir seperti investasi yang dibuat oleh Indorama di sektor tekstil senilai USD 30.72 juta pada tahun 2007, Kedaung *Industrial Group* yang berinvestasi USD 100 juta pada tahun 2008 dengan industri barang-barang pecah belahnya dengan sebutan “Pyramid Glass”, dan investasi di bidang produk makanan dengan didirikannya pabrik Indomie di Badr City pada tahun 2009.

Sementara itu investasi Mesir di Indonesia, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI saat ini tercatat hanya ada 3 investasi dari Mesir di Indonesia, dengan nilai total US\$ 450.000. Investor tersebut bergerak di bidang wholesale/distributor ekspor-impor dan biro perjalanan.¹¹

Dan secara khusus, hal-hal yang menjadi faktor utama mengapa Indonesia menandatangani *Preferential Trade Agreement* dengan Mesir bisa dilihat dari banyaknya kesamaan yang ada, peluang atas perjanjian tersebut dan tantangan kedepannya dari perjanjian ini.

Peluang

Prospek peningkatan lebih lanjut dalam perdagangan bilateral yang menjanjikan dan peluang lebih lanjut ada di pasar komoditas ekspor non

migas, khususnya untuk produk-produk seperti:

1. Barang-barang pertanian dan olahan : teh, kopi, coklat, minyak kelapa sawit (CPO), pinang, rempah-rempah, kelapa parut (santan), bahan makanan ternak, sapu lidi, keset dari sabut kelapa, pembersih sepatu, pewangi udara (untuk ruangan dan kendaraan bermotor), pembersih toilet, pembersih kaca, lap mobil (semacam kanebo), obat nyamuk bakar dan semprot, sabun mandi dan pencuci tangan, sabun pencuci piring, pasta gigi, pampers bayi, pembalut wanita, tissue, kosmetik, shampo, pakaian anak/remaja dan produk-produk konsumsi lainnya;
2. Produk makanan : mie instan, biskuit, sirup, kopi instant, minuman dalam kemasan kaleng/kotak, teh celup/botol, produk gula/permen, bumbu masak, sambel botol, kecap dan lain sebagainya;
3. Produk industri : kertas dan produknya, pulps, ban mobil/sepeda motor/sepeda, velg mobil, suku cadang mobil, asesori mobil, bahan baku plastik dan produknya, alat-alat tulis sekolah/kantor, produk-produk dari karet, yarn sintetis, synthetic fabrics, barang pecah belah, alat rumah tangga, obat-obatan, vaksin, alat-alat olah

¹¹ *Ibid*

raga, pupuk kimia/TSP, bahan kimia, insektisida, mesin-mesin serta peralatannya dan lain sebagainya.

4. Perbankan Islam dan Industri Halal : Indonesia dan Mesir yang mewakili hampir 40 % dari seluruh penduduk muslim dapat bekerja sama untuk mengembangkan satu sama lain melalui perbankan islam dan industri halal termasuk perbankan syariah, pariwisata/perjalanan agama, kosmetik, makanan dan minuman, pengembangan standar halal dan kepatuhan penegakan, sertifikasi halal, dll

¹²

Posisi strategis Mesir yang menghubungkan benua Asia, Afrika dan Eropa dengan adanya terusan Suez. Mesir dapat menjadi gerbang perdagangan ke wilayah sekitarnya. Hal ini semakin didorong dengan adanya keikutsertaan Mesir di berbagai *Free Trade Agreement* (FTA) seperti:

- COMESA (*Common Market for Eastern and Southern Africa Agreement*);
- Agadir Agreement;
- *Greater Arab Free Trade Area*;
- *Pan Arab Free Trade Area*;

¹² Kedutaan Besar Republik Indonesia, *A Solid Platform for Economic Growth* dari <http://www.kbri-islamabad.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=772&Itemid=48> diakses pada tanggal 7 maret 2014.

- FTA with Turkey;
- EFTA (FTA with Iceland, Lichtenstein, Norway and Switzerland);
- Egypt – *EU Partnership*;

Qualifying Industrial Zone with the USA (Produk-produk Mesir memiliki akses ke pasar USA tanpa bea cukai selama produk tersebut mengandunga 11.7% bahan-bahan dari Israel).

Jumlah penduduk Mesir mencapai hampir 83 juta (tertinggi di Timur Tengah dan terbesar kedua di Afrika). Jumlah penduduk yang tinggi dengan pendapatan per kapita sekitar USD 6200 mengindikasikan bahwa Mesir merupakan pasar yang sangat potensial untuk kegiatan ekspor.

Perubahan situasi politik, sosial dan ekonomi yang dialami Mesir pasca revolusi adalah peluang yang cukup potensial bagi para pengusaha Indonesia yang berminat menjalin hubungan dagang dengan para pengusaha Mesir. Bagi para pelaku usaha, meski dalam jangka pendek revolusi telah menimbulkan kerugian materil yang besar, namun dalam jangka panjang akan membuka pintu bagi persaingan yang sehat antar pelaku ekonomi. Seperti banyak disinyalir oleh media massa, di bawah kepemimpinan rezim Hosni Mubarak, telah terjadi kolusi dan nepotisme dalam bentuk pemberian keistimewaan (*privilege*) bagi keluarga dan/atau kalangan yang dekat dengan keluarga

penguasa sehingga menutup peluang pelaku bisnis lain yang berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Kebijakan Pemerintah Mesir untuk mengamankan kebutuhan pokok rakyatnya selama krisis dapat menjadi peluang bagi eksportir komoditas primer seperti bahan pangan. Sampai saat ini, KBRI Cairo terus menerima *inquiries* dari para pengusaha Mesir yang berminat mencari penyedia produk dan komoditas dari Indonesia.

Saat ini Pemerintah Mesir telah menerapkan kewajiban adanya *Certificate of Inspection Quality* (CIQ) terhadap semua produk yang diimpor dari Cina. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan dan akhirnya membuat para pengusaha Mesir mencari *resource* dari negara Asia selain Cina, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Hal tersebut membuka peluang produk Indonesia untuk bersaing di Mesir.

Untuk mengoptimalkan peluang yang ada mestinya pemerintah Indonesia membenahi produk dan jasanya dengan strategi :

1. Pengembangan aktivitas kewirausahaan agar potensi tenaga kerja Indonesia yang melimpah dapat dimanfaatkan secara optimum.
2. Pengembangan produk ekspor Indonesia, melalui:

- Pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh sektor dan produk unggulan
- Pemetaan produk potensial untuk dikembangkan

Ada tiga sektor unggulan dalam hal ekspor Indonesia ke Mesir. Pertama, minyak kelapa sawit (CPO). Pada pasar dunia, produk minyak kelapa sawit Indonesia menghadapi saingan utama dari Malaysia. Kinerja ekspor Malaysia juga lebih baik dibandingkan Indonesia disebabkan karena pemerintah Malaysia mendukung ekspor CPO dengan membebaskan secara penuh pajak terhadap komoditi CPO. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang hanya memberikan subsidi pupuk. Dari sisi kebijakan Indonesia juga tidak memiliki kebijakan nasional perkelapasawitan, misalnya pada bidang promosi. Malaysia, dalam hal ini memiliki konsep integrasi pemasaran yang melancarkan promosi di tujuh negara yang didanai oleh pemerintah.

Kedua, tekstil dan produk tekstil (TPT). Ekspor TPT Indonesia menjadi industri strategis dan andalan penghasil devisa negara untuk sektor non-migas. Yang menjadi sisi sensitif pada sektor ini adalah ekonomi biaya tinggi, yakni biaya bongkar muat Indonesia yang jauh lebih mahal dibandingkan biaya di Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Ketiga, karet. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas areal karet Indonesia sebagai yang terbesar di dunia dengan luas 3,4 juta hektar, diikuti Thailand seluas 2,6 juta hektar. Meski memiliki lahan terluas, produksi karet Indonesia tercatat sebesar 2,4 juta ton atau di bawah produksi Thailand yang mencapai 3,1 juta ton. Rendahnya produktivitas karet rakyat antara lain karena sebagian besar tanaman masih menggunakan bahan tanam asal biji (*seedling*) tanpa pemeliharaan yang baik, dan tingginya proporsi areal tanaman karet yang telah tua, rusak atau tidak produktif. Persoalan mendasar untuk meningkatkan produktivitas karet rakyat melalui peremajaan tanaman tua/rusak adalah masalah dana khusus untuk peremajaan dengan suku bunga yang wajar sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara produsen utama karet lainnya seperti Thailand, Malaysia dan India. Permasalahan utama lainnya diantaranya; (1) Masih adanya praktek penyelundupan bahan olah karet (bokar) yang akan diekspor, misalnya adanya penyelundupan bahan olahan karet dari Kalimantan ke serawak Malaysia; (2) Masih kurang layaknya infrastruktur pendukung, angkutan darat dari kebun hingga pabrik dan dari pabrik hingga pelabuhan masih buruk; (3) Adanya peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi yang tidak kondusif; (4)

Masih mahal biaya pengolahan hasil karet seperti biaya listrik dan biaya angkut.

Tantangan

Tidak hanya berdasarkan adanya kesamaan yang terlihat atas penandatanganan PTA ini, tetapi terdapat juga beberapa tantangan di dalamnya, pemerintah Indonesia harus Meningkatkan kualitas produk ekspor dari Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Pendekatan lintas sektoral untuk meningkatkan daya saing. Menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi (2004), agar mampu bersaing dalam pasar perdagangan internasional, pemerintah harus memprioritaskan pengembangan industri yang berbasis pada bahan baku lokal. Karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu menyatukan visi (Soewandi 2004, 10).

Pembentukan *Joint Study Group* (JSG) yang terdiri dari praktisi bisnis, pemerintah, serta akademisi untuk bertugas mempelajari dan mengkaji hambatan perdagangan, serta mengkaji kelayakan pembukaan perdagangan bebas antara Indonesia-Mesir.

Dengan keunggulan di sektor berbasis sumber daya alam dan produk manufaktur padat karya, perlu diperhitungkan agar celah yang sensitif ini tidak sampai tergilas oleh laju industrialisasi yang modern

hingga meminggirkan sektor yang masih menjadi tumpuan hidup rakyat. Antisipasi dan persiapan perlu diadakan secara koheren dan terkait antara produk dan faktor yang mendukung seperti pendidikan, pelatihan, dan dukungan teknologi, agar sektor unggulan ini menjadi lebih siap bersaing.

Pembenahan sektor pendukung industri dan pertanian seperti kesiapan energi, kualitas tenaga kerja, sistem perbankan baik dari segi suku bunga pinjaman, pembiayaan dan lain-lain, agar dapat mendorong pertumbuhan industri. Hal ini termasuk juga perbaikan sistem logistik nasional yang memungkinkan pergerakan barang, modal, dan tenaga kerja agar semakin efisien di berbagai sektor. Perbaikan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan dan energi. Mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi, seperti pemangkasan jalur birokrasi dan pengurangan pungutan liar. Penerapan tata kelola pemerintah dan korporasi (good governance), seperti perbaikan tata kerja dan transparansi kebijakan.

Pengoptimalan negosiasi perundingan kerja sama perdagangan internasional, melalui perbaikan koordinasi antar institusi dan kemitraan Indonesia dengan pelaku bisnis dan pihak terkait lainnya serta peningkatan kualitas negosiasi dan kualitas negosiator.

Simpulan

Selain dari ingin mengurangi ketergantungan GSP dari negara maju, dapat disimpulkan bahwa penandatanganan Preferential Trade Agreement (PTA) Indonesia dengan Mesir dikarenakan banyaknya kesamaan yang dimiliki oleh kedua negara, sehingga mempermudah dalam meningkatkan kerjasama, adanya peluang dalam peningkatan ekspor-ekspor unggulan Indonesia di pasar Mesir, seperti CPO dan produk unggulan lainnya, produk-produk dari Indonesia dapat bersaing dengan negara lain baik di Mesir, Indonesiannya sendiri dan dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara khususnya disektor ekonomi dan tentunya sebagai akses menuju bentuk perdagangan yang lebih luas diantara kedua negara, perdagangan bebas (free trade).

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Sood, "*Hukum Perdagangan Internasional*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

Visi Indonesia 2020.

<http://www.bappenas.go.id/files/3413/5228/2960/visi2002__20090929140041__2080__11.pdf>, diakses tanggal 31 Maret 2014

GSP UE dan Manfaatnya Bagi Indonesia.

<http://www.indonesianmission.eu>.

org/website/page309696063200309054484127.asp., diakses tanggal 31 Maret 2013.

Indonesia- mesir JSG.pdf
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Bilateral/Kerjasama/Subdit%20Afrika%20&%20Timur%20Tengah/Indonesia-Mesir%20JSG.pdf ,
diakses tanggal 10 september 2013.

<http://www.kemlu.go.id/cairo/Pages/AboutUs.aspx?IDP=4>

Kedutaan Besar Republik Indonesia, *A Solid Platform for Economic Growth* dari

<http://www.kbri-islamabad.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=772&Itemid=48> diakses pada tanggal 7 maret 2014.